



ADPMET

ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MIGAS & ENERGI
TERBARUKAN



Sosialisasi Hasil Munas IV ADPMET



BANYUASIN, 3 JUNI 2021



ADPMET

ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MIGAS & ENERGI
TERBARUKAN



ADPMET

Jalan Menuju Kemandirian Energi



6 September 2001

Pembentukan **Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM)** yang digagas dan di deklarasikan oleh 47 Daerah Penghasil Migas (Provinsi, Kabupaten dan Kota), bertempat di Hotel Borobudur Jakarta;

11 Desember 2001

Rapat Kerja Nasional FKDPM yang pertama, yang dihadiri oleh tiga (3) Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Menteri Keuangan RI, yang menghasilkan sebuah kesepakatan yang dinamakan **Kesepakatan Cikarang**, bertempat di Hotel Grand Sahid Cikarang;

26 Februari 2015

Munas ke III, FKDPM berubah nama dan dikukuhkan menjadi **Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)**, bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta,

21 Desember 2020

Melaui Munas ke IV, ADPM bertransformasi menjadi **Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET)**, bertempat di Hotel The Anvaya, Kuta Bali



LATAR BELAKANG

SEMANGAT BARU!



ADPM  **ADPMET**

AMANAT MUNAS ADPM
21 DESEMBER 2020
LANGKAH BARU,
SEMANGAT BARU,
TEKAD BARU
UNTUK
MELAKUKAN TRANSISI
ENERGI TERBARUKAN



adpmet

Asosiasi
Daerah
Penghasil
Migas & Energi
Terbarukan

Organisasi strategis guna mengoptimalkan dan memberdayakan energi dan sumber daya mineral khususnya sumber daya alam minyak dan gas bumi serta energi terbarukan berikut segala turunannya untuk pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Mendorong anggota menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Pusat serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya di bidang migas dan energi terbarukan;
- Memperkuat pemahaman anggota tentang pengelolaan sumber daya alam migas dan energi terbarukan yang dikelola oleh anggota, baik dalam pandangan filosofis, yuridis, politis, ekonomi, sosial budaya dan ketahanan energi;
- Meningkatkan potensi sumber daya manusia di daerah agar menjadi andal di bidang migas dan energi terbarukan; dan
- Memberikan asistensi kepada anggota termasuk perangkat dan instrumen lainnya antara lain BUMD, di dalam pengembangan industri migas dan energi terbarukan

- Memperjuangkan keterlibatan daerah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menentukan kebijakan serta pembuatan peraturan dan perundangan di bidang migas dan energi terbarukan;
- Aktif dalam kegiatan perhitungan bagi hasil migas yang transparan, wajar, dan berkeadilan;
- Melakukan kegiatan advokasi sebagai bagian upaya peningkatan pendapatan daerah dalam sektor industri migas dan energi terbarukan;
- Melakukan pengkajian dan penelitian tentang migas dan energi terbarukan, terutama yang menyangkut dan berimplikasi kepada kepentingan daerah; dan
- Meningkatkan potensi sumber daya manusia di daerah sebagai aset nasional yang andal di bidang industri migas dan energi terbarukan.



DEWAN PENGURUS ADPMET

GUBERNUR
RIAU

KETUA BID. KAJIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SDM

BUPATI
BANYUASIN

WAKIL KETUA

BUPATI
TABALONG

WAKIL KETUA

BUPATI
WAJO

WAKIL KETUA

BUPATI
MUARO JAMBI

WAKIL KETUA

BUPATI MUSI
BANYUASIN

WAKIL KETUA

WALIKOTA
TARAKAN

WAKIL KETUA

GUBERNUR
JAWA BARAT

KETUA UMUM

GUBERNUR
JAWA TIMUR

KETUA BID.
TRANSISI
ENERGI

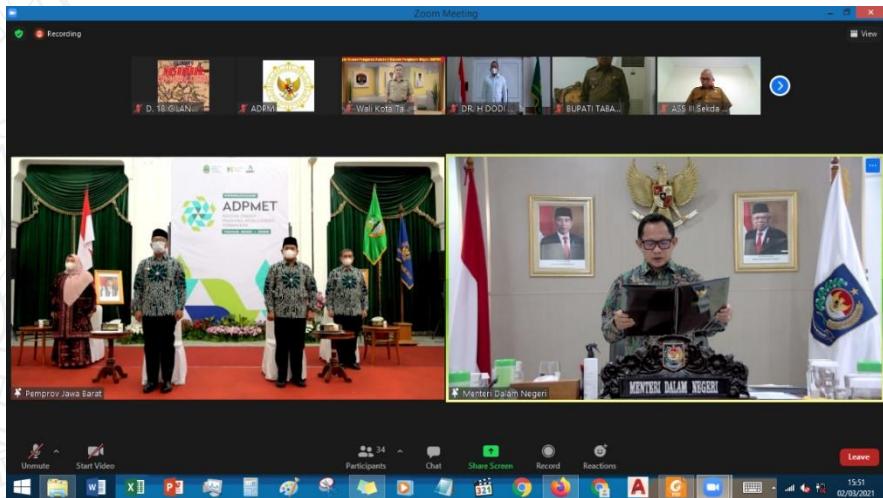
GUBERNUR
PAPUA BARAT

KETUA BID. HUBAL
DAN
PENGELOLAAN
MIGAS DAERAH



PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS

**DEWAN PENGURUS ADPMET
Dikukuhkan Oleh
Menteri Dalam Negeri RI,
pada Tanggal 2 Maret 2021 di Gedung
Sate - Bandung**





PROFIL DEWAN PENGURUS ADPMET



RIDWAN KAMIL
GUBERNUR JAWA BARAT



SYAMSUAR
GUBERNUR RIAU



KHOFIFAH I. P.
GUBERNUR JAWA TIMUR



D. MANDACAN
GUBERNUR PAPUA BARAT



ASKOLANI
BUPATI BANYUASIN



ANANG SYAKHFIANI
BUPATI TABALONG



AMRAN MAHMUD
BUPATI WAJO



MASNAH BUSRO
BUPATI MUARO JAMBI



DODY REZA ALEX
BUPATI MUSI BANYUASIN



KAIRUL
WALIKOTA TARAKAN



DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASIHAT & SEKJEN

MENTERI DALAM
NEGERI RI

MENTERI ESDM RI

MENTERI
KEUANGAN RI

DEWAN PEMBINA

DEWAN PENASIHAT



ANDANG BACHTIAR



GANJAR P.
GUBERNUR
JAWA TIMUR



ISRAN NOOR
GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR



ALEX NOERDIN
ANGGOTA KOMISI VII
DPR RI



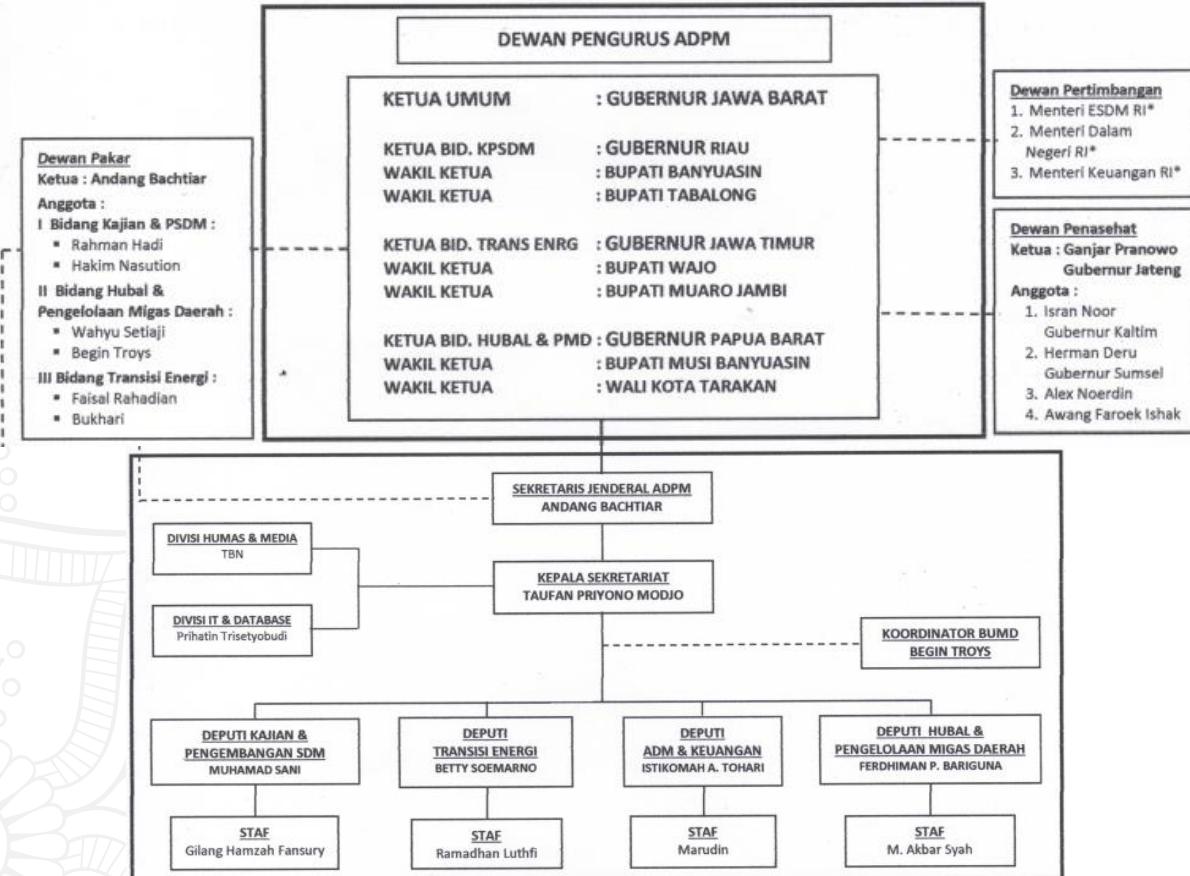
AWANG FAROEK
ANGGOTA KOMISI VII
DPR RI

SEKRETARIS JENDERAL ADPMET





STRUKTUR ORGANISASI ADPMET



Sifat keanggotaan stelsel pasif dengan penetapan sebagai daerah penghasil oleh kementerian ESDM.

20 PROVINSI

1. PROVINSI ACEH
2. PROVINSI SUMATERA UTARA
3. PROVINSI RIAU
4. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5. PROVINSI JAMBI
6. PROVINSI SUMATERA SELATAN
7. PROVINSI BANGKA BELITUNG
8. PROVINSI LAMPUNG
9. PROVINSI DKI JAKARTA
10. PROVINSI JAWA BARAT
11. PROVINSI JAWA TENGAH
12. PROVINSI JAWA TIMUR
13. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
14. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
15. PROVINSI KALIMANTAN UTARA
16. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
17. PROVINSI SULAWESI TENGAH
18. PROVINSI SULAWESI SELATAN
19. PROVINSI MALUKU
20. PROVINSI PAPUA BARAT



ANGGOTA ADPMET

60 KABUPATEN

1. KAB. ACEH UTARA
2. KAB. ACEH TIMUR
3. KAB. ACEH TAMIANG
4. KAB. DELI SERDANG
5. KAB. LANGKAT
6. KAB. BENGKALIS
7. KAB. INDRAGIRI HULU
8. KAB. KAMPAR
9. KAB. ROKAN HULU
10. KAB. ROKAN HILIR
11. KAB. SIAK
12. KAB. PELALAWAN
13. KAB. KEP. MERANTI
14. KAB. NATUNA
15. KAB. KEP. ANAMBAS
16. KAB. MUARO JAMBI
17. KAB. BATANGHARI

18. KAB.TJ JABUNG TIMUR
19. KAB.TJ JABUNG BARAT
20. KAB. SAROLANGUN
21. KAB. TEBO
22. KAB. MUARA ENIM
23. KAB. MUSI BANYUASIN
24. KAB. LAHAT
25. KAB.. BANYUASIN
26. KAB. MUSI RAWAS
27. KAB. MUSI RAWAS UTARA
28. KAB. OGAN ILIR
29. KAB. OGAN KOMERING ULU
30. KAB. LAMPUNG TIMUR
31. KAB. INDRAMAYU
32. KAB. KARAWANG
33. KAB. MAJALENGKA
34. KAB. SUBANG
35. KAB. BEKASI
36. KAB. BLORA
37. KAB. REMBANG
38. KAB. BOJONEGORO
39. KAB. BANGKALAN

39. KAB. SUMENEP
40. KAB. SIDOARJO
41. KAB. GRESIK
42. KAB. TUBAN
43. KAB. TABALONG
44. KAB. BALANGAN
45. KAB. KUTAI KERTANEGARA
46. KAB. KUTAI TIMUR
47. KAB. PENAJAM PASER UTARA
48. KAB. BULUNGAN
49. KAB. NUNUKAN
50. KAB. TANA TIDUNG
51. KAB. BARITO UTARA
52. KAB. BARITO TIMUR
53. KAB. WAJO
54. KAB. MOROWALI UTARA
55. KAB. BANGGAI
56. KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
57. KAB. SORONG
58. KAB. TELUK BINTUNI
59. KAB. RAJA AMPAT
60. KAB. PADANG LAWAS

6 KOTA

1. KOTA JAMBI
2. KOTA PRABUMULIH
3. KOTA BEKASI
4. KOTA BONTANG
5. KOTA TARAKAN
6. KOTA SAMARINDA



ANGGOTA BUMD MIGAS

**Selain Daerah Penghasil, anggota
ADPMET juga meliputi BUMD Migas
Seluruh Indonesia**



KOMPENDIUM

PERMASALAHAN DAERAH PENGHASIL MIGAS



MENJADI
FOKUS PROGRAM KERJA
ADPMET 2020 - 2025



Permasalahan Energi di Daerah

Keadilan Bagi Daerah

- Regulasi energi
- Self Sufficient energi
- Transparansi, Besaran, Metoda DBH Migas, Dana Resiko Daerah Pengolah Sinergi CSR untuk pembangunan daerah
- Realisasi Partisipasi Interes 10% BUMD, Privilege daerah dalam PI
- Domain Pemda dalam distribusi energi

Building Capacity

- Pengembangan SDM Bidang Energi
- Pemanfaatan DBH 0,5% untuk SDM
- Pengurusan Permen 37/2016,
- Data base dan ICT daerah penghasil
- Pengukuhan Tata Kelola BUMD

Transformasi Energi Terbarukan

- Transisi Energi (Gas dominan dalam bauran energi)
- Alokasi Gas bagi daerah, Pemanfaatan Gas Suar
- Pengembangan infrastruktur gas dan energi terbarukan lainnya di daerah



Program Strategis 2021

- Database, Dashboard Lifting & DBH Migas, APPS yang bisa diakses seluruh Anggota;
- Advokasi Implementasi PI 10% Bagi BUMD;
- Penggunaan DBH 0,5% untuk Pendidikan transisi dan konservasi energi;
- Advokasi Penambahan DBH Migas Minimum 1,5% (sehingga dr 15,5% menjadi 17% untuk minyak dan dr 30,5% menjadi 32% untuk gas) yang akan dipergunakan daerah penghasil untuk riset dan pilot project serta implementasi awal Transisi Energi dari Migas ke Energi Terbarukan di daerah;
- Membentuk Pemuda Transisi Energi di semua Daerah Penghasil Migas (pemanfaatan DBH dan dana perolehan PI-10%);
- Program transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan;
- Fokus pada usaha advokasi penggunaan GAS sebagai pengganti diesel/bbm di pembangkit-pembangkit di daerah penghasil migas;
- Mengorganisir promosi investasi proyek-proyek pengembangan gas dan energi terbarukan di daerah;
- Memperjuangkan pembangunan JarGas diserahkan proyek-proyeknya pada BUMD Migas, bukan hanya pada BUMN. Termasuk kemungkinan keistimewaan skema bisnis yang hybrid cross subsidi antara pasar komersial dengan pasar rumah tangga yang diselenggarakan oleh BUMD;
- Training/workshop Pengembangan SDM: Manajemen BUMD, ASN, Pemuda
- Seminar & Sosialisasi Transisi Energi (Energi Terbarukan)



PEMBIAYAAN ORGANISASI

- Gerak Langkah organisasi dibiayai dari Iuran Anggota, Iuran BUMD Migas, Sumbangan Dewan Pengurus dan Sumbangan lain yang tidak mengikat;
- Iuran Anggota merupakan Amanat Musyawarah Nasional sebagai Kekuasaan Tertinggi Organisasi;
- Besaran kewajiban iuran anggota setiap tahun paling besar adalah Rp. 80.000.000,- dan paling kecil Rp. 12.000.000,-;
- Besaran kewajiban iuran BUMD Migas: BUMD Provinsi Rp. 50,000,000,- / Tahun sedangkan BUMD Kabupaten/Kota Rp. 25.000.000,- / Tahun;
- Besaran iuran dan Sumbangan Pengurus ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengurus;



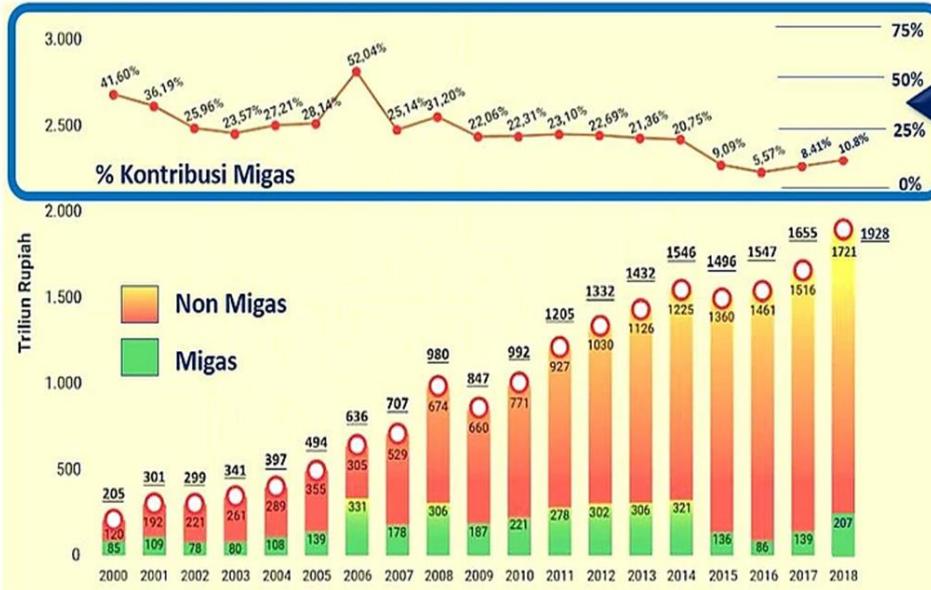
MINYAK DAN GAS BUMI



Migas Sebagai Modal Dasar Pembangunan

- Pendapatan APBN dari sektor migas terus turun
- Konsumsi migas terus meningkat.
- Migas dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk pembangunan masyarakat.
- Dibangun infrastruktur untuk mendistribusikan migas
- Meningkatkan akses energi bagi masyarakat di daerah penghasil migas
- Meningkatkan ketahanan energi daerah

PENDAPATAN NEGARA DARI MIGAS DALAM APBN 2000 - 2018

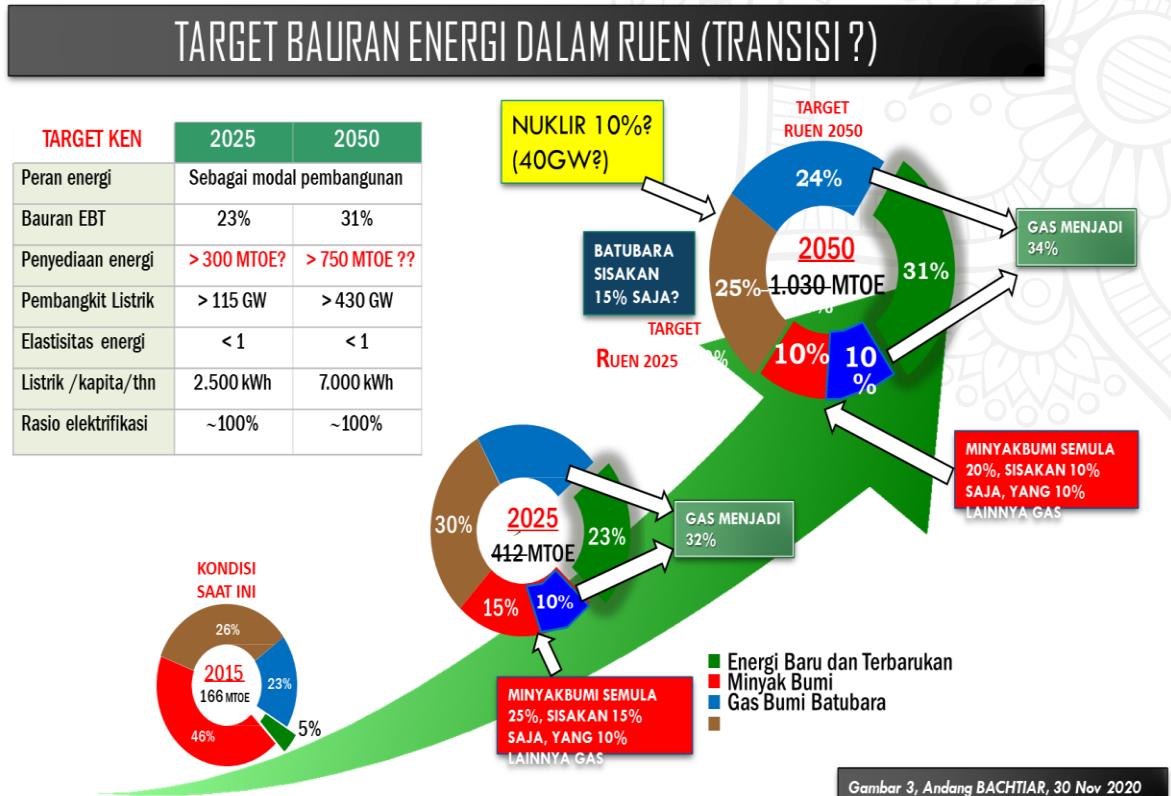


Source : Compiled sources, Kompas, LKPP (Audited 2018) excl Hibah

Transisi Energi Terbarukan

Target RUEN untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan gas.

- Produksi migas nasional tidak mencukupi kebutuhan nasional. Impor migas akan meningkatkan defisit neraca berjalan dan menekan nilai tukar rupiah.
- Defisit energi diatasi dengan pengembangan energi terbarukan dan peningkatan porsi gas dalam bauran energi nasional
- Potensi gas di daerah-daerah penghasil migas sangat besar.
- Sumber energi terbarukan juga terdapat di daerah penghasil migas.



Gambar 3, Andang BACHTIAR, 30 Nov 2020



ADPMET

ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MIGAS & ENERGI
TERBARUKAN



TRANSISI ENERGI





Latar Belakang Transisi Energi

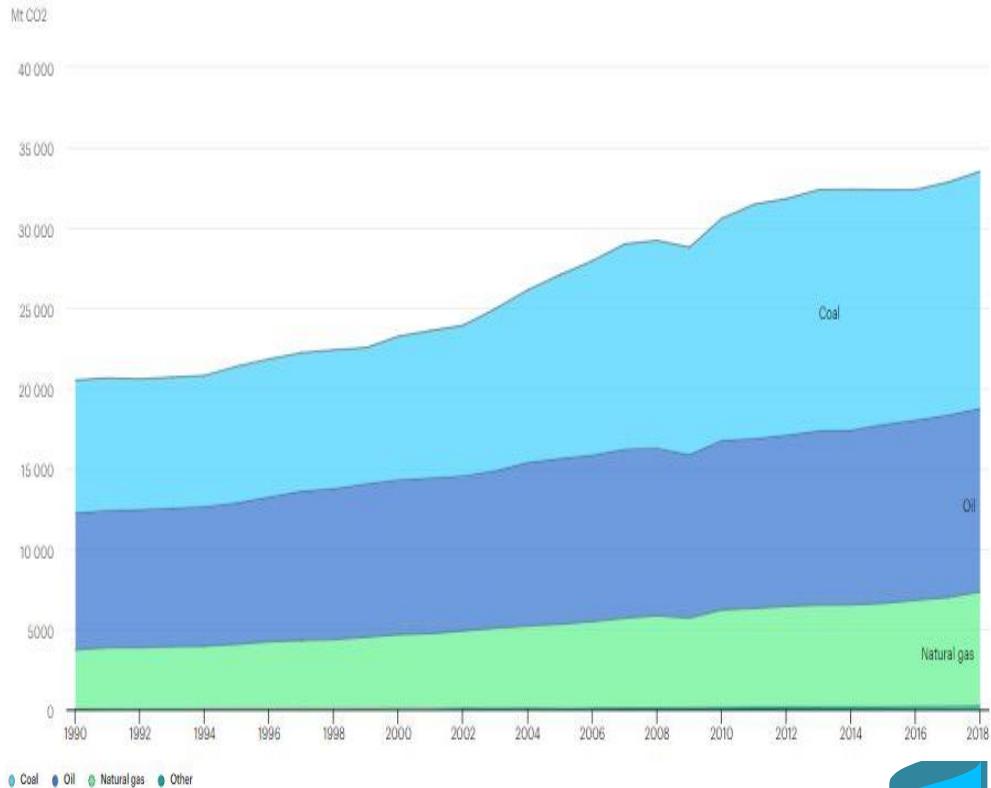
CO₂ emissions by energy source, World 1990-2018

GLOBAL

Perubahan Iklim

1. Protokol Kyoto 1997
2. Kesepakatan Paris (Paris Agreement) - 2015

- Sebagian besar polusi diakibatkan karena pembangkit energi, industri dan transportasi.
- Penghasil Emisi CO₂ terbesar masih didominasi batu bara dan diikuti minyak bumi.
- Penggunaan Natural gas yang masih rendah





Latar Belakang Transisi Energi

NASIONAL

1. Kebijakan Energi Nasional:

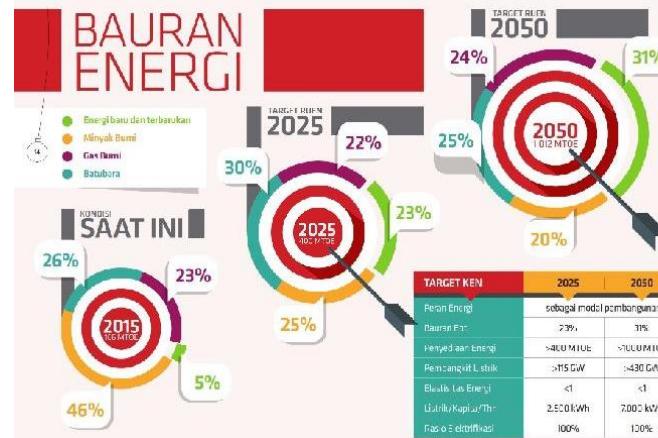
Energy Mix 23% - Energi Baru dan Terbarukan, Pengurangan emisi 29% pada tahun 2029

2. UU No. 30, 2017, Pasal 20

(2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya **sumber energi terbarukan**.

(3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.

(4) **Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.**



Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi MENDORONG PENURUNAN EMISI CO₂

Sebagai komitmen nasional dalam penurunan emisi sesuai UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to UNFCCC dan Perpres No.61/2011 tentang RAN-GRK



Latar Belakang Transisi Energi

Indonesia adalah **surga bagi energi terbarukan**. Dengan cadangan energi bersih tak kurang dari **443.208 MW** Indonesia punya peluang menjadi pemimpin Asia di bidang energi terbarukan. **Ayo wujudkan Indonesia #bebasenergifikasiol**

SURYA

POTENSI
207.898 MW
REALISASI
78,5 MW PEMANFAATAN
0,04%



AIR

POTENSI
75.091 MW
REALISASI
4.827 MW PEMANFAATAN
6,4%



PANAS BUMI

POTENSI
29.544 MW
REALISASI
1.435 MW PEMANFAATAN
1%



POTENSI ENERGI BERSIH

ADA POTENSI SEBESAR:

443.208 MW

ENERGI TERBARUKAN
DI INDONESIA

ANGIN

POTENSI
60.647 MW
REALISASI
3,1 MW PEMANFAATAN
0,01%



BIO ENERGI

POTENSI
32.654 MW
REALISASI
1.671 MW PEMANFAATAN
5,1%



MINI & MIKRO HIDRO

POTENSI
19.385 MW
REALISASI
197,4 MW PEMANFAATAN
1%



LAUT

POTENSI
17.989 MW
REALISASI
0,3 MW PEMANFAATAN
0,002%





Potensi Energi Terbarukan di Daerah Anggota ADPMET

POTENSI TENAGA SURYA



<https://geoportal.esdm.go.id/ebtke/>



Potensi Energi Terbarukan di Daerah Anggota ADPMET



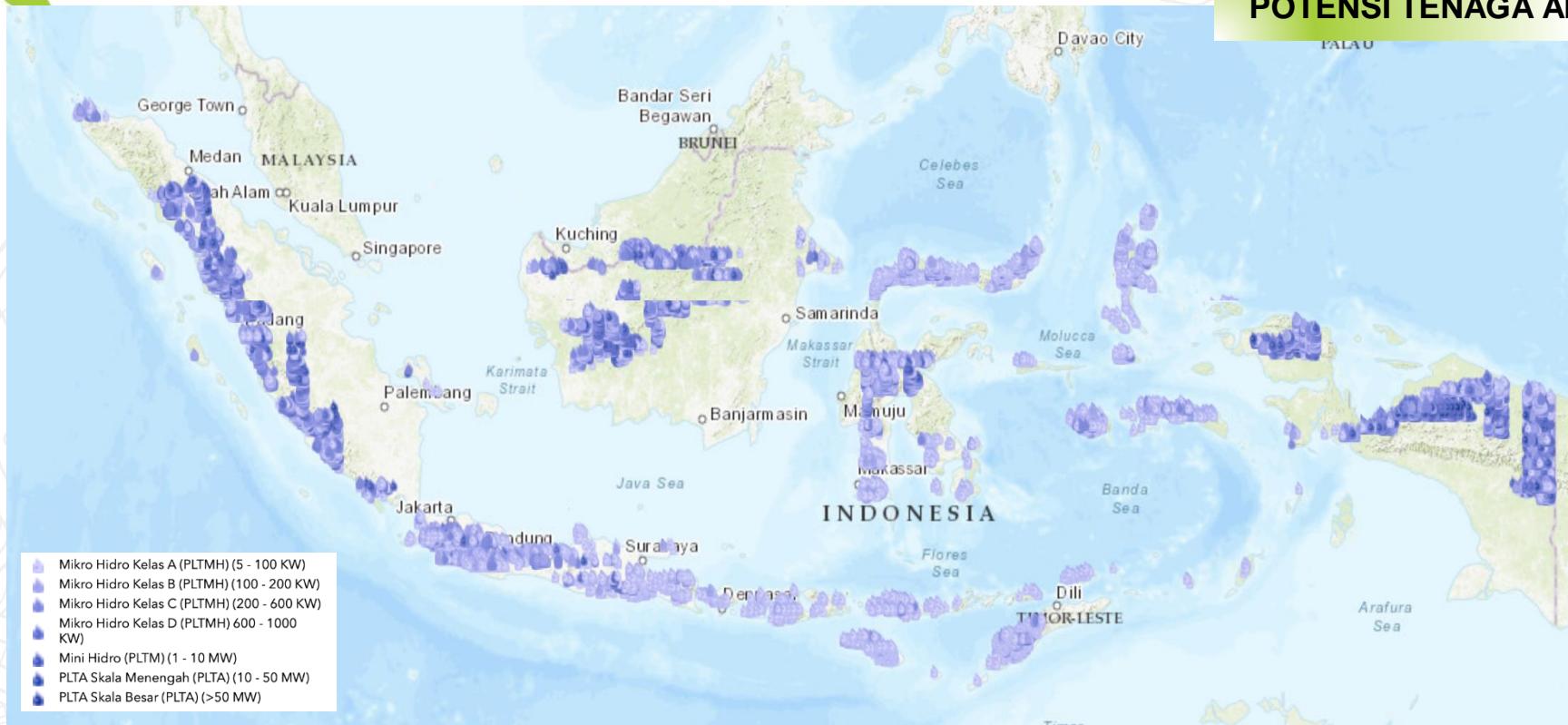
<https://geoportal.esdm.go.id/ebtke/>





Potensi Energi Terbarukan di Daerah Anggota ADPMET

POTENSI TENAGA AIR



<https://geoportal.esdm.go.id/ebtke/>



Potensi Energi Terbarukan di Daerah Anggota ADPMET

POTENSI BIO- ENERGI



<https://geoportal.esdm.go.id/ebtke/>



Potensi Energi Terbarukan di Daerah Anggota ADPMET

POTENSI GEOHERMAL



<https://geoportal.esdm.go.id/ebtke/>



Pentingnya Transisi Energi Bagi Daerah

Transisi energi bagi daerah

- Pertumbuhan ekonomi daerah
- Meningkatkan akses energi ke daerah
- Berkontribusi terhadap pencapaian target nasional dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia

Pentingnya Peranan Daerah di dalam proses transisi energi

- Daerah menentukan keberlanjutan proses transisi energi
- Daerah mendapatkan dampak secara langsung dari adanya pengembangan energi baru dan terbarukan di daerah mereka (baik dampak lingkungan maupun secara ekonomi)
- Perlunya mempertimbangkan sumber energi baru selain bahan bakar fosil.



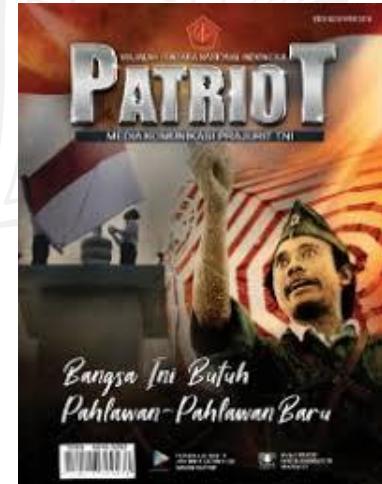


Pentingnya Transisi Energi Bagi Daerah

Pemuda Energi Terbarukan

**Membentuk Pemuda Transisi Energi di semua Daerah Penghasil Migas
(pemanfaatan DBH dan dana perolehan PI-10%)**

- Pemuda-pemudi terbaik Indonesia untuk membangun masyarakat melalui *pembangunan dan pemanfaatan pembangkit energi terbarukan* yang berkelanjutan.
- Start up energi terbarukan di daerah.
- Kampanye dan pemanfaatan energi bersih dan konservasi energi.





SEKRETARIAT ADPMET

The Energy Building, Lantai 9 SCBD Lot 11A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190 INDONESIA
Telp: (021) 29951632 Fax: (021) 29951633





ADPMET

ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MIGAS & ENERGI
TERBARUKAN



POTENSI PERUBAHAN PERMEN ESDM 37/2016 TENTANG PI 10%





Pengaruh Komersial

Adanya Perubahan Tanggal Efektif
Berlakunya PI 10%

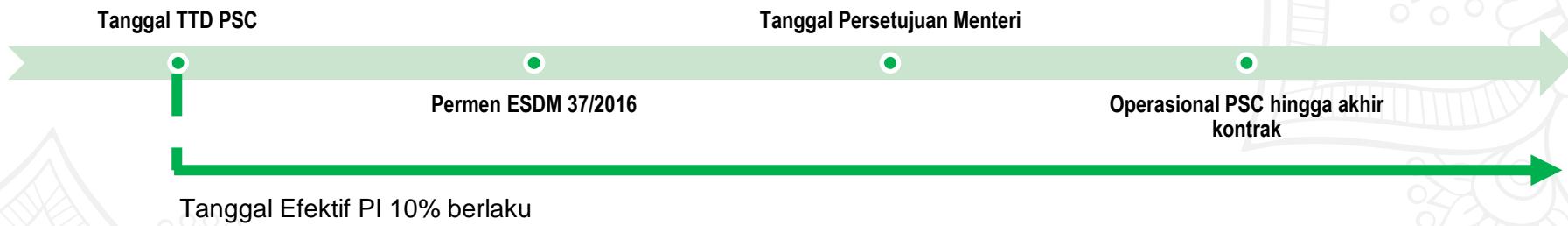
Adanya bunga/cost of money dalam
pembiayaan PI 10%



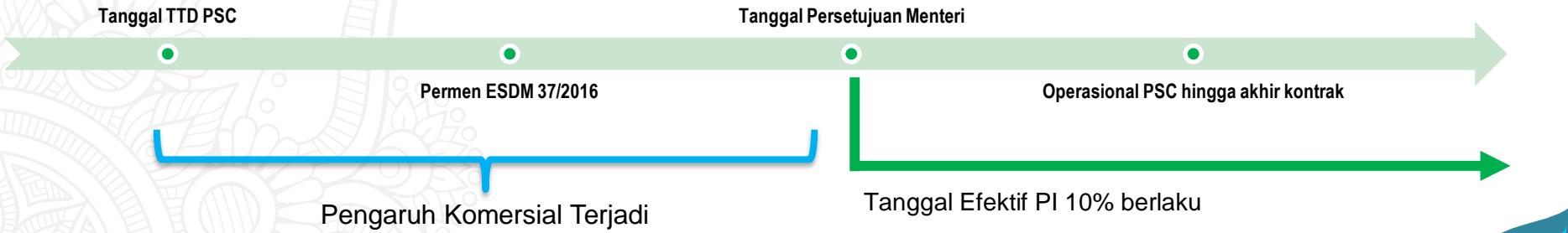


Perubahan Tanggal Efektif Berlakunya PI 10%

Kondisi saat ini → Tanggal Efektif = Tanggal Kontrak PSC Berlaku



Potensi Perubahan → Tanggal Efektif = Tanggal Persetujuan Menteri





Perubahan Tanggal Efektif Berlakunya PI 10%

Tanggal Efektif = Tanggal TTD PSC

- BUMD mendapatkan entitlement sejak awal kontrak
- BUMD menanggung depresiasi/ sunk cost/unrecovery cost yang terjadi sejak awal kontrak

Tanggal Efektif = Tanggal Persetujuan Menteri

- BUMD tidak berhak mendapatkan entitlement sejak awal kontrak
- BUMD harus tetap menanggung depresiasi/sunk cost/unrecovery cost/signature bonus yang carry forward sejak awal kontrak (jika ada)



Pengenaan Bunga/Interest Talangan PI 10%

Kondisi saat ini → Talangan PI 10% = Tidak Dikenai Bunga/Interest

Pasal 12

- (5) Pengembalian terhadap pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari bagian Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama **tanpa dikenakan bunga**.

Potensi Perubahan → Talangan PI 10% = Dikenai Bunga/Interest

Keterangan	Pertamina Global Bond 2011 PTM 2021	Pertamina Global Bond 2011 PTM 2041	Pertamina Global Bond 2012 PTM 2022	Pertamina Global Bond 2012 PTM 2042	Pertamina Global Bond 2013 PTM 2023	Pertamina Global Bond 2013 PTM 2043	Pertamina Global Bond 2014 PTM 2044	Pertamina Global Bond 2018 PTM 2048	Pertamina Global Bond 2019 PTM 2029	Pertamina Global Bond 2019 PTM 2049
Tanggal Terbit	23 Mei 2011	27 Mei 2011	3 Mei 2012	3 Mei 2012	20 Mei 2013	20 Mei 2013	30 Mei 2014	07 Nov 2018	30 Juli 2019	30 Juli 2019
Tanggal Jatuh Tempo	23 Mei 2021	27 Mei 2041	3 Mei 2022	3 Mei 2042	20 Mei 2023	20 Mei 2043	30 Mei 2044	07 Nov 2048	30 Juli 2029	30 Juli 2049
Tenor	10 Tahun	30 Tahun	10 Tahun	30 Tahun	10 Tahun	30 Tahun	30 Tahun	30 Tahun	10 tahun	30 tahun
Jumlah Obligasi yang Beredar	USD1.000 Juta	USD500 Juta	USD1.242 Juta	USD1.221,6 Juta	USD1.615 Juta	USD1.433,3 Juta	USD1.500 Juta	USD750 Juta	USD750 Juta	USD750 Juta
Kupon	5,250%	6,500%	4,875%	6,000%	4,300%	5,625%	6,450%	6,500%	3,65%	4,70%
Harga Penerbitan	98,09%	98,38%	99,41%	98,63%	100%	100%	100%	98,06%	100%	100%

- Merujuk pada Bond yang dikeluarkan salah satu KKKS (Pertamina), maka range bunga yang dikenakan berada pada rentang 3,65% s.d. 6%.
- Bunga ini belum termasuk interest premium yang akan dikenakan oleh KKS.



Pengaruh Komersial: Contoh Kasus PI 10% WK ONWJ

Isu Perubahan	Efek Perubahan	Potensi Loss	Keterangan
Perubahan Tanggal Efektif	<p>Tanggal Berlaku PI 10% WK ONWJ adalah 19 Januari 2017.</p> <p>Jika terjadi perubahan tanggal efektif, maka menjadi 17 Mei 2018</p>	<ul style="list-style-type: none">• Revenue yang hilang dari tahun 2017-2018 sebesar USD 58,5 Juta• Potensi Unrecovery Cost yang mesti ditanggung oleh BUMD sebesar USD 42,5 Juta• Potensi BUMD menanggung Signature Bonus sebesar USD 500 ribu	Dalam case PI 10% WK ONWJ, walaupun persetujuan Menteri telah terlaksana 17 Mei 2018, namun masih terjadi beberapa dispute isu antara PHE ONWJ dan MUJ ONWJ yang menyebabkan realisasi terjadi pada Februari 2019.



Pengaruh Komersial: Contoh Kasus PI 10% WK ONWJ

Isu Perubahan	Efek Perubahan	Potensi Loss	Keterangan
Pengenaan Bunga pada Talangan	Jika diasumsikan KKKS mengenakan bunga sebesar 8% atas biaya operasional maka revenue dari BUMD akan berkurang	<ul style="list-style-type: none">▪ Rata-rata biaya Operasional 4 tahun kebelakangan yang harus ditanggung oleh BUMD adalah USD 45,62 Juta.▪ Dengan demikian, setiap tahun BUMD akan mengalami potensi pengurangan pendapatan BUMD sebesar USD 3,64 Juta setiap tahunnya	Biaya operasional pada WK Eksplorasi akan lebih besar daripada WK Produksi.



Potret Proses PI 10% Provinsi Sumatra Selatan

No	Wilayah Kerja/KKKS	Kabupaten/Kotamadya	Progress
1	Jambi Merang (PHE)	Musi Banyu Asin	MoU dengan Kabupaten
2	Sakakemang (Repsol)	Musi Banyu Asin	menunggu penunjukan BUMD penerima PI-10%
3	Lematang (Medco E&P)	Muara Enim	Surat Gubernur ke SKK Migas melengkapi berkas administrasi pernyataan minat pengelolaan PI-10%
4	Merangin Dua (Jindi)	Musi Rawas Utara	MoU dengan Kabupaten
5	Blok South Sumatera (Medco E&P)	Muara Enim; Musi Banyu Asin; Musi Rawas; Lahat; PALI	Rapat Koordinasi dengan KKKS, Kabupaten, dan SKK Migas mengenai perubahan penunjukan BUMD penerima PI-10% dan kelanjutan proses Data Room dan Due Diligence
6	OganKomering (PHE)	Ogan Komering Ulu	Surat Gubernur ke SKK Migas melengkapi berkas administrasi pernyataan minat pengelolaan PI-10%
7	Belida (Seleraya)	Muara Enim	Surat Gubernur ke SKK Migas melengkapi pernyataan minat pengelolaan PI-10%
8	WestAirKomering (TiaraBumi)	Ogan Komering Ulu	menunggu penunjukan BUMD penerima PI-10%
9	RajaTempirai (PHE)	PALI	menunggu penunjukan BUMD penerima PI-10%
10	Pandan (Tropic Energi)	Musi Rawas	menunggu penunjukan BUMD penerima PI-10%
11	Palmerah (Tately NV)	Musi Banyu Asin	menunggu penunjukan BUMD penerima PI-10%
12	Karang Agung (Odira)	Banyu Asin	MoU dengan Kabupaten
13	Rimau (Medco E&P)	Musi Banyu Asin	Pengelolaan PI dengan skema lama (PP No 35/2004)



ADPMET

ASOSIASI DAERAH
PENGHASIL MIGAS & ENERGI
TERBARUKAN

Terima Kasih